# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


A. Hamzah.1996. *Hukum Pidana Ekonomi.* Jakarta Penerbit Erlangga.

A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Kencana.

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I.* Jakarta: Rajawali pers.

Adrian Sutendi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 1994*. Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Ayamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

C.F.G.W Paton. 1972. *A Text Book Of Jurisprudence, English Language Book Society.* London: Oxford University Press.

Chidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Ekonomi.* Bandung: Penerbit Binacipta.

Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021. 2021. "*Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

*Dan Upaya Pengoptimalisasianya*". Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia. 2017. *Inventaris Arsip Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1946-1969*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Hukum Pidana.* Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Emerson Yutho. *et.al.* 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.

Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fahri Hamzah. 2012. *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.

Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Mahkamah Agung. 2006. *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: MA RI.

Maria Farida Indrati. S. 2013*. Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan.* Jakarta: Kanisius.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mr. L. Th Vervloet dan Mr. Mohammad Jusuf. 1962. *Pelanggaran Ekonomi di Indonesia*. Semarang; Sumur Bandung.

Muh. Afdal Yanuar. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset.* Malang*:* Setara Press.

Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor.* Jakarta; Penerbit Buku Kompas.

P.A.F Lamintang. 2012. *Hukum Penintensier Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta; Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni.

Pusat Pelaporaan dan Analisis Trasaksi Keuangan. 2017. *Laporan Semester 1 2017*. Jakarta; PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2018. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*.Jakarta; PPATK.

Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rihantoro Bayuaji. 2019. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia.

Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Subintoro Miharjo. 2022. *Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung: Indscript Creative.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

Syahrijal Syukur, *et.al.* 2022. Himpunan Anotasi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Syed Husein Alatas. 1987. *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.*

Yoserwan dan Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Yunus Husein. 2019*. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddie O.S Hiariej. 2023*. Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok; Rajawali Pers.

**Jurnal dan Karya Ilmiah Lainya**

A Wijayanti. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Law Reform. Volume 9 Nomor 1.

Agus Pranoto. *et.al*. 2018. K*ajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut HUkum Pidana Indonesia*. Jurnal Legalitas. Volume X Nomor 1.

Ardi Ferdian. 2012. *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi.* Arena Hukum. Volume 6 Nomor 3.

B.G.M. Widipradnyana Arjaya. 2016. *Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor,* Jurnal Cita Hukum. Volume 4 Nomor1.

Budi Suhariyanto. 2018*. Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 7 Nomor 1.

Dessy Rochman Prasetyo. 2016. *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12 Nomor 24.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. 2023. "*Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022".*

Fathin Abdullah. *et.al*. 2021. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. Jurnal Ilmiah "Advokasi". Volume 9 Nomor 1.

Fitrizia Blessi Karina. 2017. *Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lex Crimen. Volume IV Nomor 9.

Fuad Hasan. 2022. *Kemungkinan atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang*. AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism, Volume 1 Nomor 1.

Maggie Regina Imbar. 2015. *Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.* Lex Crimen. Volume 4 Nomor 1.

Maria Silvya E. Wangga. 2012. *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jurnal Hukum. Volume 3 Nomor 2.

Mashendra. 2020. *Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Petitum. Volume 8 Nomor 1.

Michael Julnius Christhopher Siahaya. 2015. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen. Volume IV Nomor 2.

Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini. 2023. *Perlawanan Terhadap Perampasan Asetyang Disita Dalam Perkaratindak Pidana Korupsi.* Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 Nomor 2.

Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus. 2019. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum.* Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16 Nomor 3.

Sadino dan Bela Nurul Hidayati. 2017. *Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi.* Jurnal Magister Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1. Pascasarjana Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta Selatan.

Taufan Prawira. 2022. *Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri.* Jurnal Ilmiah Indonesia. Volume 7 Nomor 5.

Tim Penyusun. 2022. "*Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT*)". PPATK. Edisi Desember 2022.

**Skripsi**

Anan Putri. 2021*. Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 336 K/Pid.Sus/2015).* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hangkoso Satrio W. 2012. *Perampasan Aset Dalam Perkara Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid/Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie).* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Raty Addinda Putri. 2022. *Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

**Tesis**

Wahyudi Hafiludin Sadeli. 2010. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi.* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU/-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta-Utara Timur Nomor 03/1997/UT/Ekonomi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN-JKT PST, atas nama terdakwa Fuad Amin.

**Artikel Internet**

Bambang Naroyono, 2023, Kejagung Tangani Korupsi Yang Merugikan Negara Rp.33,09 Triliun Sepanjang 2022. Diakses dari: https://news.republika.co.id/berita/rnspvj485/kejakgung-tangani-korupsi-yang-merugikan-negara-rp-3309-t-sepanjang-2022.

Dian Dewi Purnamasari. 2023. *RUU Perampasan Aset Diyakini Akan Efektifkan Pemberantasan TPPU.* Kompas.com. Edisi Tanggal 9 November 2023.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. *Indonesia Resmi Bergabung Sebagai Anggota Financial Action Task Force Ke-40.* Diakses dari: https://kemlu.go.id/portal/id/read/5471/view/indonesia-resmi-bergabung-sebagai-anggota-financial-action-task-force-ke-40.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, diakses dari: https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%20Perampasan%20Aset%20.pdf.

*The FATF Recommendation. sumber:* https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan kegiatan/publikasi/Documents/FATF%20Recommendations%202012%20-%20Updated%20March%202022.pdf.

*United Nation Convention Against Corruption*. Diakses dari: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

Zubaedah Hanum dan Theofilus Ifan Sucipto, 2023*. 73,9 % Masyarakat Sebut RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan*. Diakses dari: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/585022/739-masyarakat-sebut-ruu-perampasan-aset-mendesak-disahkan.